



**IMPLEMENTASI PENERAPAN DATA
ANALYTIC FOR AUDIT PADA
PROSEDUR ANALITIS DENGAN
BERBANTUAN KOMPUTER DALAM
REVIU LKPD**

**RIDWAN PUTRA PAMUNGKAS
198905222012101001**

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
LATAR BELAKANG	1
A. Gambaran Umum Reviu LKPD	1
B. Permasalahan.....	1
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
A. Tinjauan Teori	3
B. Studi Kasus Pada Reviu LKPD Anambas.....	4
1. Analisis horizontal antara LO, LRA dan Neraca pada Pos Pendapatan Retribusi.....	4
BAB III	5
SIMPULAN	5

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Gambaran Umum Reviu LKPD

Pada tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual (Lampiran I). Dengan mengacu pada SAP, laporan keuangan yang dihasilkan diharapkan akan berkualitas dan dapat dibandingkan, baik antar entitas maupun antar periode pelaporan dan disusun sesuai dengan SAP serta berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sehingga dapat menghasilkan informasi yang andal. Peran APIP diperlukan untuk melakukan reviu atas LKPD dalam rangka meyakini keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepala daerah kepada BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Permasalahan

Dalam melakukan reviu LKPD berbasis akrual, masih ditemui APIP yang belum mengerti proses penyusunan laporan keuangan yang disusun dengan basis akrual, sehingga pelaksanaan reviu LKPD menjadi tidak efektif dan belum membantu sepenuhnya kepala daerah dalam menghasilkan LKPD yang berkualitas.

Selain masih ada yang kurang memahami proses penyusunan laporan keuangan, APIP juga masih perlu dibekali dengan strategi dan langkah-langkah praktis dalam melaksanakan reviu LKPD, antara lain: pengujian saldo awal akun-akun Neraca, LPE, dan LPSAL; pengujian kesesuaian format LKPD dengan SAP; pengujian kesesuaian saldo akun-akun LKPD yang merupakan gabungan saldo akun-akun LK SKPD; pengujian hubungan antar komponen laporan keuangan (prosedur analitis).

Untuk lebih memudahkan pemahaman dan pelaksanaan reviu LKPD dan meningkatkan kualitas reviu LKPD oleh APIP pemda, BPKP melalui Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menyusun Petunjuk Teknis Bimbingan dan Konsultasi Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berbasis Akruai (Juknis Bimkon Reviu LKPD Berbasis Akruai) dan Suplemen Prosedur Analitis dalam Reviu LKPD.

Seiring perkembangan zaman, di mana kebutuhan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat menuntut penggunaan teknologi, termasuk dalam melakukan reviu LKPD. Penelusuran angka akun dengan bantuan komputer dapat mempermudah pereviu dalam memperoleh saldo akun setiap entitas yang akan direviu tanpa harus membuka laporan keuangan satu-per-satu.

Dalam melakukan reviu, sering kali dijumpai akses pada *Database Management System* (DBMS) yang digunakan pada Aplikasi Keuangan dan penggunaan query SQL masih belum optimal. Selain itu, tidak seluruh APIP memiliki keahlian terkait DBMS dan query SQL.

Untuk itu diperlukan suatu aplikasi yang dapat membantu APIP dalam melakukan reviu sehingga reviu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Teori

Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual, reviu atas LKPD berbasis akrual yang selanjutnya disebut reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan, dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Prosedur analitis adalah prosedur untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai dengan SAP.

Continuous auditing adalah suatu proses audit elektronik secara komprehensif yang memungkinkan auditor untuk memberikan suatu tingkat jaminan dalam informasi yang berkelanjutan secara simultan dan segera setelahnya melakukan pengungkapan untuk informasi tersebut (McMickle, Razaee, Sharbatoghlie, & Elam, 2002). Menurut (Rezaee, Elam, & Sharbatoghlie, 2001) continuous auditing terdiri dari 5 tahap berikut ini: (1) Merencanakan penugasan audit termasuk prosedur analitis. (2) Mempertimbangkan struktur pengendalian internal RTA termasuk kinerja uji pengendalian dan penilaian risiko pengendalian. (3) Melaksanakan pengujian substantif interim dan berkelanjutan terhadap transaksi secara detail. (4) Pada akhir tahun, melaksanakan pengujian substantif terhadap neraca saldo dan hasil keseluruhan termasuk prosedur analitis. (5) Melengkapi audit dan menerbitkan laporan audit.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Rukmi dkk, 2018).

B. Studi Kasus Pada Reviu LKPD Anambas

1. Analisis horizontal antara LO, LRA dan Neraca pada Pos Pendapatan Retribusi

Dalam penatausahaan dan penyusunan LKPD, Pemerintah Kabupaten Anambas menggunakan

Hasil analisis horizontal antara LO, LRA dan Neraca pada Pos Pendapatan Retribusi adalah sebagai berikut:

Persamaan		Keterangan
Pendapatan Retribusi (LO) harus sama dengan Pendapatan Retribusi (LRA) dikurangi Piutang Retribusi Awal Tahun ditambah Piutang Retribusi Akhir Tahun		Pendapatan Retribusi (LO) = Pendapatan Retribusi (LRA) - Piutang Retribusi Awal Tahun + Piutang Retribusi Akhir Tahun
Rumus		
Pendapatan Retribusi (LO)	:	4.697.373.114,83
Pendapatan Retribusi (LRA)	:	4.702.560.814,83
Piutang Retribusi Akhir Tahun (Neraca)	:	0,00
Piutang Retribusi Awal Tahun (Neraca)	:	0,00
Selisih	:	5.187.700,00

Pada analisis tersebut, terdapat selisih antara pendapatan LO dan LRA sebesar Rp5.187.700,00. Dalam melakukan penelusuran atas selisih tersebut, tim reviu Inspektorat Anambas harus meminta keterangan pada setiap OPD yang memiliki kewenangan memungut retribusi. Dari hasil wawancara, diperoleh keterangan bahwa selisih tersebut merupakan pelunasan utang Retribusi IMB yang sudah dicatat/diakui di LO pada tahun 2020, kemudian disetor dan dicatat pada LRA sesuai waktu pelunasan yaitu pada tahun 2021.

Dengan berbantuan komputer, prosedur analitis bisa dipersingkat dengan mengakses langsung ke DBMS melalui aplikasi khusus untuk prosedur analitis reviu. Pereviu cukup melakukan konfirmasi atas selisih yang telah diperolehnya ke OPD terkait.

BAB III

SIMPULAN

Berdasarkan studi kasus yang telah dijelaskan pada Bab II, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi berupa aplikasi khusus pada reviu LKPD dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan tingkat akurasi khususnya dalam pelaksanaan prosedur analitis. Selain itu, pereviu juga tidak dituntut untuk memahami DBMS dan query SQL sehingga dapat lebih fokus pada aspek akuntansi dan audit.